

Media Online	Cilacap.pikiran-rakyat.com
Tanggal	12 Agustus 2025
Wilayah	Kabupaten Purbalingga



Anggaran Rp2 Triliun Lebih, APBD Purbalingga 2026 Defisit Rp13,4 Miliar

<https://cilacap.pikiran-rakyat.com/jawa-tengah/pr-2399565444/anggaran-rp2-triliun-lebih-apbd-purbalingga-2026-defisit-rp134-miliar>

CilacapUpdate.com - Pemerintah Kabupaten Purbalingga bersama DPRD telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Tahun Anggaran 2026.

Kesepakatan ini menetapkan arah pembangunan daerah dengan fokus pada penguatan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta digitalisasi pelayanan publik.

Penandatanganan nota kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tersebut berlangsung dalam rapat paripurna di ruang sidang DPRD Purbalingga, Jawa Tengah. Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, menyampaikan bahwa penyusunan KUA-PPAS mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang menetapkan batas waktu penyepakatan paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

Ia menegaskan bahwa arah kebijakan APBD 2026 dirancang berdasarkan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Prioritas tersebut mencakup peningkatan konektivitas melalui pembangunan infrastruktur, pengembangan usaha mikro dan pertanian modern, perbaikan mutu layanan pendidikan dan kesehatan, serta transformasi digital pada sektor layanan publik.

Dalam rancangan KUA-PPAS 2026, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2,169 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp2,182 triliun.

Hal ini menciptakan defisit anggaran sebesar Rp13,4 miliar. Untuk menutup kekurangan tersebut, pemerintah daerah mengandalkan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 senilai Rp15 miliar, dengan dikurangi penyertaan modal daerah sebesar Rp1,6 miliar.

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 disusun berdasarkan analisis potensi serta capaian tahun sebelumnya. Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi masih dalam bentuk proyeksi dan dapat mengalami penyesuaian seiring perkembangan alokasi dana dalam APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah.

Ketua DPRD Purbalingga, Bambang Irawan, menyebutkan bahwa nota kesepakatan ini merupakan hasil dari pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.

Setelah disetujui, dokumen ini akan dituangkan dalam keputusan DPRD dan ditandatangani oleh ketua dewan serta kepala daerah sebagai dasar dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD 2026.***